

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR  
DI UNIT SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN  
BELAJAR KOTA YOGYAKARTA**



**Oleh:**

**SURYANTI  
NIM: 22204091002**

**TESIS**

Diajukan kepada Program Magister (S2)  
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan KeTutoran UIN Sunan Kalijaga

Untuk

Memenuhi Salah Satu Syarat guna memperoleh

Gelar Magister Pendidikan (M.Pd.)

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

**YOGYAKARTA**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suryanti, S. Hum  
NIM : 22204091002  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 06 Mei 2024



Suryanti, S.Hum.  
22204091002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suryanti, S. Hum  
NIM : 22204091002  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 06 Mei 2024

Saya menyatakan



Suryanti, S.Hum.  
22204091002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Nama : Suryanti, S. Hum  
NIM : 22204091002  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam syarat munaqasyah saya menggunakan foto berjilbab. Jika dikemudian hari terdapat suatu masalah bukan menjadi tanggung jawab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  
Terimakasih.

Yogyakarta, 06 Mei 2024

Saya menyatakan



Suryanti, S.Hum.  
22204091002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513056 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1214/U.a.02/DT/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI MANAJEMEN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DI UNIT SATUAN PENDIDIKAN NON-FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SURYANTI, S.Hum  
Nomor Induk Mahasiswa : 22204091002  
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Prof. Dr. H. Sangkot Sirait, M.Ag  
SIGNED

Valid ID: 6636642751315



Pengaji I  
Dr. H. Refik, M.Ag  
SIGNED

Valid ID: 6636642751315



Pengaji II  
Dr. Mohamad Agung Rokhmawati, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 6636642751315



Yogyakarta, 30 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
Prof. Dr. H. Sri Sumarmo, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 6636642751315

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah  
Dan Keguruan UIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis berjudul:

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DI  
UNIT SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN  
BELAJAR KOTA YOGYAKARTA**

Yang ditulis oleh

Nama : Suryanti

NIM : 22204091002

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister (S2) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Pendidikan (M. Pd).

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 6 Mei 2024

Pembimbing



Prof. Dr. H. Sangkot Sirait, M.Ag

NIP. 19591231 199203 1 009



## MOTTO

*"Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya dan kemudian menyebarkannya."*<sup>1</sup>

Sufyan bin Uyainah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup> "https://Serpong.Khoiruummah.Id/Ilmu-Khoiru-Ummah-Serpong/," n.d.

## ABSTRAK

**Suryanti, 22204091002.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar kebijakan, implementasi manajemen dan keberhasilan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Yogyakarta dalam Menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama** Kebijakan penerapan kurikulum merdeka belajar di SKB Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan menindaklanjuti SK pemerintah dengan penerapan kebijakan kurikulum dengan kriteria yang dipusatkan pada empat faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi: **Kedua**, Implementasi manajemen kurikulum merdeka belajar dilaksanakan dengan mengaplikasikan fungsi-fungsi manajemen yang secara konseptual memiliki unsur-unsur teori fungsi manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) yang terukur dan sistematis. Evaluasi dan perbaikan terus menerus menjadi landasan bahwa pelaksanaan kurikulum merdeka belajar evaluasi akhir kurikulum baru dilakukan satu kali, oleh karena itu perlu adanya kegiatan evaluasi secara terus menerus walaupun hasilnya sudah menunjukkan cukup baik dan perlu pengembangan yang maksimal. **Ketiga**, Sanggar kegiatan belajar (SKB) Kota Yogyakarta telah menunjukkan keberhasilan dalam penerapan kurikulum merdeka belajar melalui berbagai inovasi dan kegiatan yang mendukung pembelajaran yang mandiri dan kreatif. Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di SKB Kota Yogyakarta mencakup sejumlah kegiatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi dan karakter Warga belajar sesuai dengan profil pelajar pancasila. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa SKB Kota Yogyakarta berada pada tahap pengembangan dan penyempurnaan dalam penerapan kurikulum merdeka belajar.

**Kata Kunci:** Implementasi Manajemen, kebijakan, kurikulum merdeka belajar, sanggar kegiatan belajar kota yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## ***ABSTRACT***

**Suryanti, 22204091002.** The purpose of this study is to determine the basis of policy, management implementation and success of the Yogyakarta City Learning Activity Center (SKB) in Implementing the Merdeka Belajar curriculum. This research uses a qualitative approach with a type of case study research. Data collection techniques use interviews, observations, and document studies. Data analysis techniques are carried out by reducing data, presenting data, drawing conclusions and verifying data. The results showed that: ***First***, the policy of implementing an independent learning curriculum in SKB Yogyakarta City is implemented by following up the government decree with the implementation of curriculum policy with criteria focused on four factors of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure: ***Second***, The implementation of independent learning curriculum management is carried out by applying management functions that conceptually have elements of the theory of POAC management functions (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) that are measurable and systematic. Continuous evaluation and improvement are the basis that the implementation of the independent learning curriculum final evaluation of the curriculum is only carried out once, therefore it is necessary to have continuous evaluation activities even though the results have shown quite well and need maximum development. ***Third***, the Yogyakarta City Learning Activity Center (SKB) has shown success in implementing the independent learning curriculum through various innovations and activities that support independent and creative learning. The implementation of the Merdeka Belajar Curriculum at SKB Yogyakarta City includes a number of learning activities that focus on developing students' competencies and character in accordance with the Pancasila student profile. Based on the results of the study, it can be concluded that SKB Yogyakarta City is at the stage of development and refinement in the implementation of the independent learning curriculum.

**Keywords:** Management Implementation, policy, independent learning curriculum, learning activity studio of Yogyakarta City.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur peneliti panjatkan hanya kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan karunia dan hidayahnya untuk semua makhluk di muka bumi. Shalawat dan salam selalu peneliti panjatkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan atau jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini dengan Al- Qur'an dan Sunnah. Alhamdulillah kata itulah yang selalu peneliti panjatkan untuk mensyukuri penyelesaian tesis ini karena dengan pertolongan Allahlah peneliti bisa menghadapi banyaknya rintangan dan halangan dalam pembuatan tesis ini, sehingga pada akhirnya peneliti mampu menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar di Lembaga Pendidikan NonFormal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Yogyakarta.” guna memenuhi syarat dalam rangka memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kesuksesan penelitian ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Phil Al-Makin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu

Tarbiyah dan KeTutoran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. H. Karwadi, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan KeTutoran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta dan sekaligus Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan, masukan. Serta selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis. Serta bimbingan kepada peneliti selama menempuh pendidikan pada Program Magister Manajemen Pendidikan Islam ini.
4. Ibu Dr. Nur Saidah, S.Ag., M.Ag. selaku sekretaris Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan KeTutoran UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak bantuan selama penelitian melakukan penelitian hingga dapat terselesaikan tesis ini.
5. Bapak Prof. Sangkot Sirait, M.Ag selaku pembimbing tesis yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu, membimbing, dan mengarahkan peneliti dengan penuh kesungguhan dan kesabaran hingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan selesai.
6. Segenap dosen pembimbing Kegiatan *International Field Study*, Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan KeTutoran khususnya Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah

mendidik, memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti serta telah banyak membantu dan mengarahkan peneliti selama belajar di Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan KeTutoran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Kepala sekolah sanggar kegiatan belajar SKB Kota Yogyakarta yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh tutor, pamong dan warga belajar di SKB Kota Yogyakarta telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada keluarga ku tercinta Bapak Aswad , Ibu Amnah, kaka ST.salma, Ramlah, Afriadin, Nurhayati, dan adiku tercinta jainul. Yang selalu mendo'akan saya tiada henti, memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, finansial, motivasi dan kesempatan untuk saya melanjutkan pendidikan hingga bangku pascasarjana. Menjadi suatu kebanggaan untuk saya menjadi salah satu dari bagian keluarga ini yang sudah selalu menguatkan saya dan memberikan kepercayaan penuh atas apa yang sudah menjadi pilihan saya sekarang. Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, rezeki dan penulis dapat membahagiakan keluarga ini.
10. Kepada teman saya yang sudah selalu berusaha menemani saya selama menempuh pendidikan megister dengan kesabaran dan menjadi tempat saya berkeluh kesah.

11. Teman organisasi, asrama mufida dan orang-orang baik yang Allah hadirkan dalam setiap proses perjalanan sampai hari ini terimakasih untuk setiap pelajaran yang pernah diberikan.
12. Dan seluruh teman-teman Angkatan 2022 Program Studi Manajemen Pendidikan Islam kelas B UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah samasama berjuang menyelesaikan studi ini
- Peneliti memohon maaf yang sebesar besarnya atas segala kekurangan yang ada dalam penyusunan tesis ini. Tak ada pemikiran sempurna di dunia ini, begitu juga dengan penelitian ini sehingga kritik maupun saran sangat diharapkan guna mengembangkan serta menyempurnakan tesis ini. Harapan dari peneliti semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Manajemen Pendidikan Islam kedepannya dan masyarakat yang membaca tesis ini.

Yogyakarta, 06 Mei 2024

Penulis



Suryanti, S.Hum.

NIM: 22204091002

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini dipersembahkan untuk almamater Tercinta  
Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam  
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan KeTutoran  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta





## DAFTAR ISI

COVER .....	
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB .....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	v
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS .....	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	vii
MOTTO.....	vii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
PERSEMBAHAN.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Kerangka teori.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	33
BAB II: METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
C. Sumber Data Penelitian .....	36
D. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data .....	38
E. Uji Keabsahan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	41
BAB III: ASIL DAN PEMBAHASAN .....	44
A. Profil Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Yogyakarta .....	44
1. Visi dan Misi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Yogyakarta.....	44
2. Keadaan Lokasi .....	45
3. Struktur Organisasi .....	46

4. Sejarah Penerapan Kurikulum di SKB Kota Yogyakarta .....	50
B. Dasar Kebijakan Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar di SKB.....	53
Kota Yogyakarta .....	53
1. Kebijakan penerapan kurikulum merdeka belajar di SKB Kota Yogyakarta .....	53
2. Cara memposisikan kebijakan kurikulum merdeka di SKB Kota Yogyakarta .....	54
3. Pelaksanaan Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di SKB Kota Yogyakarta ....	75
4. Evaluasi kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di SKB Kota Yogyakarta .....	78
C. Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar di .....	83
Sanggar Kegiatan Belajar Kota Yogyakarta .....	83
1. <i>Planning</i> (Perencanaan) kurikulum merdeka belajar di SKB Kota Yogyakarta.....	85
2. <i>Organizing</i> (Pengorganisasian) kurikulum merdeka belajar di SKB Kota Yogyakarta.....	93
3. <i>Actuating</i> (Pelaksanaan) kurikulum merdeka belajar di SKB Kota Yogyakarta.....	99
4. <i>Controlling</i> (Pengawasan) kurikulum merdeka belajar di SKB Kota Yogyakarta.....	105
D. Keberhasilan Sanggar Kegiatan Belajar Kota Yogyakarta.....	107
dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar .....	107
1. Peningkatan Kemampuan Tutor dalam mengembangkan kurikulum yang lebih efektif dan efisien .....	108
2. Peningkatan Partisipasi Warga Sekolah dalam proses Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar.....	113
3. Peningkatan kualitas pendidikan. ....	115
BAB IV .....	119
KESIMPULAN.....	119
A. Kesimpulan .....	119
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA .....	122
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	128
RIWAYAT HIDUP .....	161

## DAFTAR TABEL

TABEL. 1.1 INSTRUMEN OBSERVASI.....	138
TABEL1.2 INSTRUMEN WAWANCARA .....	140



DAFTAR GAMBAR

KOSP SKB KOTA YOGYAKARTA.....	150
DOKUMENTASI KEGIATAN.....	160



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu komponen penting di lembaga pendidikan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan isi pengajaran, serta tolak ukur keberhasilan dan kualitas pendidikan adalah kurikulum. Namun demikian, kurikulum seringkali tidak mampu mengikuti kecepatan laju perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan dan pembenahan kurikulum harus senantiasa dilakukan secara berkesinambungan, kaitannya dengan manajemen merupakan aspek yang menyentuh, mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, karena dengan manajemen dapat diketahui kemampuan dan kelebihan serta dapat dikenali kekurangan suatu organisasi atau lembaga pendidikan.<sup>2</sup> Dalam hal ini, maka peran manajemen sangat menentukan arah dan tujuan Pendidikan khususnya manajemen kurikulum.

Manajemen kurikulum merupakan bentuk usaha atau upaya bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran khususnya usaha untuk meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Maka diperlukan sebuah, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang merupakan satuan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan untuk mendukung keberhasilan pembelajaran dalam pendidikan nasional.<sup>3</sup> Di samping itu,

---

<sup>2</sup> Ibrahim Nasbi, "Manajemen Kurikulum: Sebuah Kajian Teoritis," *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 1, no. 2 (2017): hlm 18, <https://doi.org/10.24252/idaarah.v1i2.4274>.

<sup>3</sup> Amiruddin MS Syafaruddin, "Manajemen Kurikulum," *Perdana Publishing*, (2017).hlm.20.

perubahan dan pengembangan kurikulum selalu memunculkan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan dalam proses mengimplementasikan sebuah kebijakan. Pengembangan dan pembaharuan kurikulum merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan segala dimensinya.<sup>4</sup>

Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berupaya untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan kualitas pendidikan dengan kebijakan Kurikulum merdeka belajar sebagai penyempurnaan kurikulum 2013.<sup>5</sup> Istilah kata merdeka disini mengacu pada tingkat kemandirian yang dimiliki Tutor dan Warga belajar untuk saling memberi kebebasan dalam hal mengeksplorasi ilmu pengetahuan di sekolah.<sup>6</sup> Kurikulum merdeka belajar juga dapat dikatakan sebagai kurikulum yang diterapkan untuk memulihkan kurikulum darurat pasca pandemi covid-19. Dengan begitu, penerapannya belum tersebar luas dan baru beberapa daerah yang sekolahnya baru menerapkan kurikulum merdeka belajar.<sup>7</sup>

Kurikulum merdeka belajar mewajibkan para Tutor agar dapat menerapkan pembelajaran berbasis intrakurikuler di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep

---

<sup>4</sup> Madahi Veronica Aguayo Torrez, "Konsep Dan Fungsi Manajemen Pendidikan Yasya" 3, No. 1 (2021): hlm.49.

<sup>5</sup> Teguh Triwiyanto, "Buku-Manajemen-Kurikulum.Pdf," 2015.hlm.12.

<sup>6</sup> Fachruddin Azmi Dan Juli Iswanto, Merdeka Belajar,*International Journal Of Islamic Education, Research And Multiculturalism Ijierm: Vol. 3 No. 3 September – December 2021*, hlm. 157.

<sup>7</sup> Rahmawaty Alkatiri, Intan Safitri Mokodompit, and Rahmathias Jusuf, "Manajemen Kurikulum Madrasah Aliyah Berorientasi Merdeka Belajar Di Sulawesi Utara," *Journal of Islamic Education Leadership* 2, no. 1 (2022): 73–86, <https://doi.org/10.30984/jmpi.v2i1.444>.



dan menguatkan kompetensi.<sup>8</sup> Adanya perubahan kurikulum ini Tutor harus mempersiapkan ulang metode, pendekatan, serta bahan ajar, dan kebutuhan belajar lainnya sesuai kurikulum baru. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui kesiapan Tutor dalam implementasi Kurikulum merdeka belajar.<sup>9</sup>

Untuk mengatasi berbagai tantangan-tantangan ini, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, Tutor, orang tua, dan masyarakat untuk menyediakan dukungan yang diperlukan bagi para Warga belajar. Ini termasuk pelatihan bagi Tutor, penyediaan sumber belajar yang memadai, dan bantuan kepada Warga belajar yang membutuhkan. Hal tersebut terjadi karena pelatihan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan kabupaten, kota, bahkan pemerintahan di level nasional tidak mendesain bahan pelatihan dengan baik dan waktu pelatihannya yang singkat.<sup>10</sup>

Menteri pendidikan Nadiem A. Makarim mengartikan merdeka belajar sebagai sebuah kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri. Kurikulum merdeka merupakan suatu kurikulum yang memberikan kebebasan atau keleluasaan pendidik dalam menciptakan

---

<sup>8</sup> “<https://Ditsmp.Kemdikbud.Go.Id/Kurikulum-Merdeka-Sebagai-Upaya-Pemulihan-Pembelajaran/>,” n.d.

<sup>9</sup>Ulinniam, “*Penerapan Kurikulum Revisi 2013 Di Masa Pandem Pada Smk Ibs Tathmainul Qullub Indramayu*.”hlm.11.

<sup>10</sup> “Ahmad Sahnun, dan Tri Wibowo, Arah Baru Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Di Sekolah Dasar, Sittah: *Journal of Primary Education*, Vol. 4 (1), April, 2023, hlm. 30,” n.d.

pembelajaran berkualitas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dengan mengedepankan penguatan profil pelajar Pancasila.<sup>11</sup>

Implementasi Kurikulum Merdeka belajar, masih kurang mendapat dukungan dari warga sekolah sebab masih kurang pemahaman terkait cara yang harus dilakukan untuk menyukseskan pengimplementasian kurikulum merdeka belajar. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>12</sup> Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan untuk kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), wakakurikulum, komite sekolah, dan tenaga pendidik mengenai Kurikulum merdeka belajar.<sup>13</sup>

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Yogyakarta menerapkan kurikulum merdeka belajar sejak tahun 2022. Pada awal penerapan kebijakan tentu seluruh tenaga pendidik dan kependidikan mengalami penyesuaian dan membutuhkan proses yang cukup panjang, yakni dari perubahan pola pengembangan kurikulum dan perubahan sistem dalam mata pelajaran yang disajikan kepada peserta didik, serta pengembangan program dengan membangun mitra kolaborasi dengan instansi lainnya.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Abdul Fattah Nasution and Meyniar Albina, "Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Aliyah Negeri Labuhanbatu," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 03 (2022): hlm.32., <https://doi.org/10.30868/ei.v11i03.3063>.

<sup>12</sup> Ley 25.632, "Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Sekretariat Daerah Kota Samarinda" 3, No. 53 (2002): hlm.81.

<sup>13</sup> Rizqa Oktavia Amari, "Manajemen Kurikulum Merdeka Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Nganjuk," 2023, hlm.35.

<sup>14</sup> Djuwarijah Djuwarijah, "Strategi Peningkatan Manajemen Kurikulum Dalam Pengembangan Mutu Sdm Menuju Terwujudnya Lulusan Madrasah Aliyah Berwawasan Internasional," *El-Tarbawi* 1, no. 2 (2008): 201–14, <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol1.iss2.art4>.

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan salah satu satuan pendidikan luar sekolah yang menyediakan layanan pendidikan dan keterampilan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. informal.<sup>15</sup> Sanggar Kegiatan Belajar SKB, merupakan program kesetaraan yang menyelenggarakan program keterampilan dan pemberdayaan sesuai dengan kurikulum pendidikan kesetaraan dan kurikulum merdeka. Dengan mengkombinasikan belajar secara luring dan pembelajaran daring, untuk memberikan kemudahan dan kesesuaian capaian pembelajaran bagi peserta didik, sehingga dapat belajar kapan saja dan dimana saja.

Adapun penerapan kurikulum merdeka belajar di SKB Kota Yogyakarta masih dilakukan secara bertahap yang artinya baru diterapkan di beberapa kelas dan jenjang pendidikan, sesuai dengan pedoman pelaksanaan kurikulum merdeka belajar. Selain itu, sistematika dan susunan yang ada dalam kurikulum merdeka belajar ini sebenarnya sangat sederhana dalam penerapannya. Namun, belum semua Tutor di sanggar kegiatan belajar tersebut belum memahami dengan benar mengenai sistematika dan susunan yang ada pada kurikulum merdeka belajar dan tentu menjadi faktor penghambat dalam penerapan kurikulum merdeka belajar.

Berdasarkan observasi dan realita yang ditemukan bahwa Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Yogyakarta menerapkan kurikulum merdeka belajar, setelah program ini diluncurkan. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

---

<sup>15</sup> Irfana Nurul Laili, Nunuk Hariyati, and Erny Roesminingsih, "Implementasi Manajemen Kurikulum Pada Program Unggulan Non Akademik Di Sdit Firdaus Mojosari Mojokerto," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 8, no. 2 (2022): 1452–63, <https://doi.org/10.58258/jime.v8i2.3223>.

Kota Yogyakarta termasuk salah satu sekolah rujukan bagi lembaga pendidikan nonformal lainnya yang sudah menerapkan kurikulum merdeka belajar. Dikarenakan belum banyak lembaga pendidikan nonformal yang menerapkan kurikulum merdeka belajar, SKB Kota Yogyakarta menjadi contoh untuk lembaga pendidikan nonformal lainnya. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam, observasi (pengamatan), dan dokumentasi agar dapat mengetahui keberadaan masalah yang terjadi yakni kebijakan kurikulum merdeka belajar dan sistematika yang diterapkan untuk menunjang penerapan kurikulum merdeka belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Yogyakarta. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan bidang penelitian yang dikaji yaitu mengarah pada penerapan manajemen kurikulum merdeka di SKB Kota Yogyakarta.

Maka dengan melihat hasil observasi dilapangan permasalahan penelitian ini berkaitan dengan implementasi manajemen kurikulum merdeka belajar dan dasar kebijakan penerapan kurikulum merdeka di unit satuan pendidikan nonformal SKB kota yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka fokus permasalahan dari penelitian ini yaitu Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar di Unit Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Yogyakarta” maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dasar Kebijakan di Sanggar Kegiatan Belajar Kota Yogyakarta dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar?
2. Bagaimana Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka di Sanggar Kegiatan Belajar Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana Keberhasilan Sanggar Kegiatan Belajar Kota Yogyakarta dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Menganalisis Dasar Kebijakan di Sanggar Kegiatan Belajar Kota Yogyakarta dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar?
2. Untuk Menganalisis Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka di unit Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Yogyakarta?
3. Untuk mengetahui keberhasilan sanggar kegiatan belajar kota yogyakarta dalam menerapkan kurikulum merdeka belajar?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setelah adanya penjabaran latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan kegunaan penelitian yang ditinjau dari dua jenis kegunaan, yaitu sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian yang diperoleh dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap kurikulum yang dimana kurikulum ini merupakan kurikulum terbaru di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan informasi bagi penyelenggara pendidikan dalam upaya mengimplementasikan kurikulum.

## 2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti peneliti dapat mengetahui strategi penerapan yang tepat, efektif dan efisien dalam manajemen kurikulum baru di Indonesia yaitu kurikulum merdeka belajar.
2. Bagi Lembaga (UIN Sunan kalijaga Yogyakarta) seluruh komponen yang ada di UIN Sunan kalijaga Yogyakarta bisa dijadikan sebagai masukan bagi masing-masing mahaWarga belajar agar berperilaku dan berakhlak mulia baik kapanpun dan dimanapun keberadaannya.
3. Bagi Lembaga (UPT SPNF Kota Yogyakarta) dapat memberikan sumbangan informasi tentang penerapan kurikulum merdeka belajar sebagai upaya pemulihan pendidikan yang unggul dan berkualitas untuk menghasilkan Warga belajar dengan lulusan yang memiliki akhlakul karimah dalam konteks pertumbuhan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. penguasaan kemampuan akademik dan non akademik, 10 pembinaan keterampilan hidup, kesenian dan pengembangan karakter kepribadian insan Warga belajar.



4. Bagi Pembaca dapat memberi gambaran dan pandangan terkait penerapan manajemen kurikulum kurikulum merdeka belajar yang dilakukan oleh UPT SPNF Kota Yogyakarta.

#### **E. Kajian Pustaka**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan sehingga hal pertama yang dilakukan adalah menelusuri penelitian-penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar di lembaga pendidikan nonformal. Manajemen kurikulum merupakan bidang ilmu manajemen pendidikan yang telah dibahas oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa karya tulis yang peneliti temukan dengan topik yang masih berkaitan dengan implementasi manajemen kurikulum merdeka belajar di lembaga pendidikan nonformal, diantaranya adalah:

1. Artikel Elda Suci Putri Aida (2023), *Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar Di Sdit Sabilul Huda Kota Cirebon*.<sup>16</sup> yang difokuskan untuk memahami sistematis kegiatan manajemen kurikulum mulai dari merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kurikulum baru yaitu kurikulum merdeka belajar di SDIT Sabilul Huda Kota Cirebon. Penelitian ini memiliki perbedaan yaitu terkait dengan

---

<sup>16</sup> Elda, "Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar Di Sdit Sabilul Huda Kota Cirebon."

lembaga pendidikan, yang dimana peneliti sebelumnya berfokus pada lembaga pendidikan formal sehingga dapat menimbulkan perbedaan hasil penelitian.

2. Artikel Kartini Marzuki, dkk. (2022), *Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan Nonformal*.<sup>17</sup> Mengungkapkan sejauh mana pendidikan nonformal dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka pada satuan pendidikan nonformal yang dilaksanakan pada pokja PAUD dan Kesetaraan, dengan meninjau perangkat pembelajaran yang digunakan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian dicocokkan dengan Kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik, setelahnya peserta didik akan mengikuti sepenuhnya rule yang ada, Factor pendukung keterlaksanaan merdeka belajar pada satuan Pendidikan nonformal adalah memonitoring, mengevaluasi, dari kedua tahapan tersebut akan menentukan berhasil tidaknya program merdeka belajar dilaksanakan. Adapun factor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan merdeka belajar meliputi: 1) proses adaptasi kurikulum dengan program merdeka akan berdampak pada peserta didik dan tutor. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang dimana penelitian ini fokus pada Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan Nonformal.

---

<sup>17</sup> Ahmad Ahmad Et Al., "Evaluasi Kebijakan Merdeka Belajar Pada Satuan Pendidikan Nonformal," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, No. 2 (2022): 1143, <https://doi.org/10.37905/Aksara.8.2.1143-1154.2022>.

3. Tesis Margi Jayanti (2023), *Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar (Studi Kasus di SMPN 1 Trimurjo)*.<sup>18</sup> Menunjukkan bahwa: (1) Dalam perencanaan, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan telah dirancang dengan mengacu pada prinsip-prinsip merdeka belajar, dan telah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik; (2) Pengorganisasian dilakukan kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dengan membentuk koordinator, membuat surat keputusan dan membagikan tugas yang melibatkan wali kelas dan Tutor, membuat deskripsi pelaksanaan tugas mendistribusikan tugas kepada stakeholder; (3) dalam proses pelaksanaan, belum semua Tutor memahami prinsip-prinsip merdeka belajar, sumber belajar masih berpusat pada Tutor. (4) Pengawasan dilakukan secara langsung melalui kegiatan supervisi, pemantauan, dan pengontrolan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa SMPN 1 Trimurjo berada pada tahap pengembangan dan penyempurnaan dalam penerapan kurikulum merdeka belajar. Penelitian ini memiliki perbedaan yaitu terkait dengan lembaga pendidikan, yang dimana peneliti sebelumnya berfokus pada lembaga pendidikan formal sehingga dapat menimbulkan perbedaan hasil penelitian.
4. Artikel Irfana Nurul Laili dkk (2022), *Implementasi Manajemen Kurikulum Pada Program Unggulan Non Akademik Di Sdit Firdaus*

---

<sup>18</sup> Margi Jayanti, "Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar (Studi Kasus Di Smpn 1 Trimurjo)," 2023, 1–66.

*Mojosari Mojokerto.*<sup>19</sup> Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana implementasi manajemen kurikulum berdasarkan fungsi manajemen: perencanaan kurikulum, pengorganisasian kurikulum, pelaksanaan kurikulum, pengawasan dan evaluasi kurikulum, dan pengembangan kurikulum pada program unggulan non-akademik di SDIT Firdaus Mojosari. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan rancangan penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini memiliki perbedaan yaitu terkait dengan lembaga pendidikan, yang dimana peneliti sebelumnya berfokus pada lembaga pendidikan formal sehingga dapat menimbulkan perbedaan hasil penelitian. Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu tentang Implementasi Manajemen Kurikulum.

5. Tesis Fahrian Firdaus Syafi'i (2021), *Merdeka Belajar: Sekolah Penggerak*.<sup>20</sup> Menunjukkan bahwa Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar peserta didik secara holistik dengan mewujudkan profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta nonkognitif (karakter) yang diawali dengan SDM yang unggul (kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Tutor. Penelitian yang diteliti oleh penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif

---

<sup>19</sup> Laili, Hariyati, and Roesminingsih, "Implementasi Manajemen Kurikulum Pada Program Unggulan Non Akademik Di Sdit Firdaus Mojosari Mojokerto."

<sup>20</sup> Restu Rahayu et al., "Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di Sekolah Penggerak," *Jurnal Basicedu* 6, no. 4 (2022): 6313–19, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3237>.

dengan Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Adapun kelebihan dari penelitian yang diteliti terdapat pada variabel yang diteliti yaitu implementasi manajemen kurikulum merdeka belajar. Penelitian ini memiliki perbedaan yaitu terkait objek penelitian.

## **F. Kerangka teori**

Berbagai teori yang dikemukakan dalam kajian ini merupakan sarana untuk menjawab rumusan masalah yang telah dituliskan di muka dan sebagai landasan untuk melakukan analisis penelitian. Dalam bab ini penulis membahas yang pertama Implementasi Manajemen kurikulum, kedua, kurikulum Merdeka belajar, ketiga, Dasar kebijakan, Sangar Kegiatan Belajar Kota Yogyakarta.

### **a. Makna Kurikulum Merdeka**

#### **1. Dasar Kebijakan Kurikulum *Merdeka***

Sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) membuat kebijakan merdeka belajar. Dasar kebijakan tersebut merupakan buah dari arahan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Setelah diterbitkan kebijakan pokok tersebut, sampai saat ini per 11 Mei 2022 sudah ada 19 kebijakan pendidikan, antara lain yaitu:

1. Merdeka belajar 1 tentang Asesmen Nasional, USBN, RPP, dan PPDB,
2. Merdeka belajar 2 tentang Kampus Merdeka,
3. Merdeka Belajar 3 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Operasional Sekolah (BOS),
4. Merdeka Belajar 4 tentang Program Organisasi Penggerak,
5. Merdeka Belajar 5 tentang Tutor Penggerak,
6. Merdeka Belajar 6 tentang Transformasi Dana Pemerintah untuk PerTutoran Tinggi,
7. Merdeka Belajar 7 tentang Program Sekolah Penggerak,
8. Merdeka Belajar 8 tentang SMK pusat Keunggulan,
9. Merdeka Belajar 9 tentang KIP Kuliah Merdeka,
10. Merdeka Belajar 10 tentang Perluasan Program BeaWarga belajar LPDP,
11. Merdeka Belajar 11 tentang Kampus Merdeka Vokasi,
12. Merdeka Belajar 12 tentang Sekolah Aman Berbelanja dengan SIPlah,
13. Merdeka Belajar 13 tentang Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana,
14. Merdeka Belajar 14 tentang Kampus Merdeka dari Kekerasan. Seksual,
15. Merdeka Belajar 15 tentang Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar,



16. Merdeka Belajar 16 tentang Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan,
17. Merdeka Belajar 17 tentang Revitalisasi Bahasa Daerah,
18. Merdeka Belajar 18 tentang Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesia, dan
19. Merdeka Belajar 19 tentang Rapor Pendidikan Indonesia.<sup>21</sup>

Secara keseluruhan kebijakan merdeka belajar merupakan sebuah solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, layanan pendidikan bisa di akses oleh semua lapisan masyarakat tanpa terikat dengan ruang waktu, mengingat saat ini kita sudah memasuki revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Sehingga semua layanan pendidikan harus berbasis teknologi, hal juga membantu dalam mengatasi masalah pandemic Covid-19 yang menjadi wabah penyakit sedunia.

Kebijakan merdeka belajar diterapkan untuk membantu mengatasi masalah pendidikan yang sering kali terjadi berulang-ulang yang membatasi ruang gerak Tutor maupun murid dalam mengekskplore diri dengan banyaknya administrasi yang harus dipenuhi. Dengan kebijakan ini, diharapkan proses pembelajaran yang berada di sekolah lebih efektif dan efisien. Semangat untuk

---

<sup>21</sup> Kemendikbudristek, “Buku Saku: Tanya Jawab Kurikulum Merdeka,” *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi*, 2022, 9–46, <http://repositori.kemdikbud.go.id/id/eprint/25344>.

melakukan inovasi dan perubahan inilah roh pertama program merdeka belajar untuk diterapkan di sektor pendidikan Indonesia. Apalagi di era revolusi industri 4.0, sistem pendidikan diharapkan dapat mewujudkan peserta didik memiliki keterampilan yang mampu berfikir kritis dan memecahkan masalah, kreatif dan inovatif serta keterampilan komunikasi dan kolaborasi.<sup>22</sup>

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, merdeka belajar adalah memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Melalui kebijakan Merdeka Belajar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim ingin menciptakan suasana belajar yang happy dan kondusif bagi peserta didik. Merdeka belajar menurut Mendikbud berangkat dari keinginan agar output pendidikan menghasilkan kualitas yang lebih baik dan tidak lagi menghasilkan Warga belajar yang hanya jago menghafal namun juga memiliki kemampuan analisis yang tajam, penalaran serta pemahaman yang komprehensif dalam belajar untuk mengembangkan diri.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Sitti Ammas, "Pembelajaran Daring Dalam Perspektif Merdeka Belajar," *Jurnal Sipatokkong BPSDM Sulawesi Selatan* 2, no. 1 (2021): hlm.40, <http://ojs.bpsdmsulsel.id/index.php/sipatokkong/article/view/103/66>.

<sup>23</sup> Sulham B Sarmila, Andi Tenri Sanna, "Peran Birokrasi Dalam Kebijakan Peningkatan Mutu," *MAPPESONA Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam*, no. 1 (2021): 12–21, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7mKvqr6f4AhUXRmwGHfVVA9cQFnoECC8QAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.iainbone.ac.id%2Findex.php%2Fmappesona%2Farticle%2Fdownload%2F1769%2F942&usg=AOvVaw3cRVGEBFqYWuYhXP78YP>.

Kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah. Menurut Van Meter dan Van Horn kebijakan adalah kegiatan yang memerlukan upaya untuk menerjemahkan keputusan menjadi tindakan nyata dalam kerangka waktu tertentu.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dalam mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.<sup>25</sup>

Dasar kebijakan publik perlu disadari bahwa dalam melaksanakan suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan. Terdapat banyak model implementasi menurut para ahli, diantaranya model implementasi kebijakan publik menurut pakar kebijakan publik menurut George Edward III terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau

---

<sup>24</sup> Deborah J. Barrett, *Leadership Communication* (Bandung, Jawa Barat, Indonesia: McGraw, 2013).hlm.45.

<sup>25</sup>“[https://Elearning.Menlhk.Go.Id/Pluginfile.Php/845/Mod\\_resource/Content/1/Index.Html](https://Elearning.Menlhk.Go.Id/Pluginfile.Php/845/Mod_resource/Content/1/Index.Html),” n.d.

kegagalan penerapan kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.<sup>26</sup> George Edward III menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

a. Komunikasi

Faktor pertama adalah Komunikasi, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi kebijakan adalah proses yang memperjelas dan mengkomunikasikan kebijakan kepada publik.<sup>27</sup> Komunikasi kebijakan harus jelas, efisien, dan memiliki konsistensi. Proses komunikasi kebijakan juga membutuhkan sumber daya yang cukup, seperti sumber daya manusia, pendanaan, dan peralatan. Kebijakan publik perlu dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat, agar setiap kebijakan publik tersampaikan dan dipahami masyarakat secara utuh. Komunikasi kebijakan yang baik dan efektif akan membuat publik atau masyarakat umum akan paham dan bisa melaksanakan kebijakan yang telah disusun atau direncanakan.

Strategi komunikasi dalam implementasi kebijakan juga penting untuk mendukung implementasi kebijakan yang efektif,

---

<sup>26</sup> Brent L Iverson and Peter B Dervan, "Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan- Membangun Prasarana Fisik, Sosial Dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado," *Ilmusosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan* 3 (2016): hlm.30.

<sup>27</sup> "Https://Www.Ksi-Indonesia.Org/Id/Wawasan/Detail/2519-Komunikasi-Kebijakan-Lebih-Penting-Ketimbang-Sosialisasi-Kebijakan,"

sehingga para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan di kerjakan.<sup>28</sup> Pengetahuan atas apa yang akan di kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus diransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan didalam masyarakat.

Menurut Edward III, ada tiga metrik untuk menilai efektivitas faktor komunikasi.<sup>29</sup> Berikut adalah beberapa tanda yang harus diperhatikan:

1. Konsistensi, yang menunjukkan bahwa perintah harus jelas dan konsisten untuk diikuti
2. Transmisi, yang menyatakan bahwa komunikasi yang baik akan menghasilkan komunikasi yang baik
3. Kejelasan, yang menyatakan bahwa komunikasi yang baik yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan sederhana untuk dipahami sehingga mudah untuk dilakukan tindakan;

---

<sup>28</sup> “<https://Kominfo.Jatimprov.Go.Id/Berita/Kadis-Kominfo-Jatim-Strategi-Komunikasi-Mendukung-Implementasi-Kebijakan-Yang-Efektif>,” .

<sup>29</sup> Ahmad Sahnun and Tri Wibowo, “Arah Baru Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Di Sekolah Dasar,” *SITTAH: Journal of Primary Education* 4, no. 1 (2023):hlm.32., <https://doi.org/10.30762/sittah.v4i1.783>.

Perubahan reguler pada instruksi yang dikeluarkan dapat menimbulkan kontroversi di antara mereka yang ditugaskan untuk melaksanakannya di lapangan. Sehubungan dengan pencarian atau penyebaran informasi tentang Kebijakan Merdeka Belajar di Unit Satuan Pendidikan NonFormal di SKB, telah dilakukan segala upaya yang wajar untuk memastikan akurasi dan relevansinya.

b. Sumber daya

Menurut George C. Edward III bahwa sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya sumber daya yang tersedia,<sup>30</sup> karena menurut George C Edward III sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan, sedangkan sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu.

Sumber daya dalam implementasi kebijakan pendidikan di lembaga pendidikan terdiri dari sumber daya manusia, informasi, dan fasilitas. Sumber daya manusia meliputi Tutor, tenaga administrasi, serta sumber daya lainnya yang memiliki peran penting dalam melaksanakan kebijakan pendidikan.

---

<sup>30</sup> George R ; Terry, *Asas-Asas Manajemen* (Bandung: Alumni, 2012)hlm.63.



Informasi merupakan sumber daya yang sangat penting dalam pendidikan, sehingga komunikasi yang baik dan efektif harus dilakukan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan. Fasilitas, seperti bangunan, alat-alat, dan peralatan, juga merupakan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan pendidikan efektif.<sup>31</sup>

Sumber daya manusia memainkan peran yang sangat penting dalam menjalankan kebijakan. Oleh karena itu, sumber daya merupakan faktor penting dalam aktualisasi strategi apapun. Sumber daya pendukung, termasuk personel, dana, dan sarana fisik, sangat penting bagi keberhasilan kebijakan pembelajaran di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Program SKB sebagian didanai oleh pemerintah, dan peserta juga harus mempertimbangkan biaya pribadi.

Tanpa pendanaan yang cukup, proses implementasi kebijakan tidak dapat berjalan lebih jauh. Kemungkinan kegagalan kebijakan meningkat secara dramatis jika tidak didukung oleh sumber daya yang memadai, terlepas dari seberapa baik persiapannya.<sup>32</sup> Komponen penting dari

---

<sup>31</sup> Nurin Kusnia, "Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Di SDN Betet 1 Kediri," *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan* 3, no. 1 (2019): hlm.25. <https://doi.org/10.26740/jdmp.v3n1.p>.

<sup>32</sup> Kresna, "Indikator Implementasi Kebijakan Publik," *Namaha*, no. September (2019) hlm.43. <https://konsultasiskripsi.com/2019/09/15/indikator-implementasi-kebijakan-publik-skripsi-dan-tesis/>.



implementasi kebijakan adalah informasi, yaitu informasi yang relevan dan memadai tentang implementasi kebijakan.

c. Disposisi

Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan, jika pelaksana kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.<sup>33</sup> Disposisi di lembaga pendidikan nonformal adalah proses yang penting dalam melaksanakan kebijakan pendidikan nonformal. Disposisi ini mencakup tahap pengesahan dan penerbitan dokumen kurikulum pendidikan nonformal, serta pendirian satuan pendidikan nonformal.

Kebijakan Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar, di Unit satuan pendidikan NonFormal diberikan izin untuk menerapkan program Kurikulum Merdeka Belajar di semua bagiannya, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Norma dan aturan digunakan untuk memutuskan bagaimana lembaga pendidikan menerapkan di setiap jenjang pendidikan yang berbeda akan membagi tanggung jawab mereka. Kebijakan Kebebasan Belajar di lembaga pendidikan dapat diberlakukan

---

<sup>33</sup> “<https://Dpmpstsp.Bireuenkab.Go.Id/Izin-Penyelenggaraan-Satuan-Pendidikan-Non-Formal-Kabupaten-Bireuen/>,”

dengan cara apa pun yang sesuai dengan program dan bidang akademik sekolah.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi di lembaga pendidikan adalah sistem keorganisasian yang mengatur bagaimana keputusan pendidikan diambil dan diimplementasikan. Birokrasi pendidikan digunakan untuk mempermudah pelayanan publik dan membantu mengembangkan pendidikan yang unggul.<sup>34</sup> Di dalam lembaga pendidikan, birokrasi pendidikan mengatur bagaimana keputusan pendidikan diambil dan diimplementasikan, serta bagaimana sumber daya manusia, informasi, dan fasilitas digunakan untuk melaksanakan kebijakan pendidikan.<sup>35</sup> Peran birokrasi pendidikan adalah untuk mengambil keputusan pendidikan secara mandiri, mengelola urusan pendidikan, dan membantu mengembangkan pelayanan prima terutama merespon kepentingan publik.<sup>36</sup>

Struktur Birokrasi Kebijakan yang kompleks, seperti kebijakan Merdeka Belajar pada Unit Satuan Pendidikan NonFormal, bisa dilakukan dengan bantuan pihak lain. Ketika sistem pemerintahan tidak berjalan dengan baik dalam proses mewujudkan suatu program, hal ini dapat membuat program

---

<sup>34</sup> Huges Murjani, "Strategi Reformasi Birokrasi Pendidikan Dan Kebijakan Kemendikbud," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6 (2022): hlm.58.

<sup>35</sup> Sarmila, Andi Tenri Sanna, "Peran Birokrasi Dalam Kebijakan Peningkatan Mutu."

<sup>36</sup> Murjani, "Strategi Reformasi Birokrasi Pendidikan Dan Kebijakan Kemendikbud."

menjadi kurang efektif dan mempersulit penerapannya. Standar Operasional Prosedur membentuk kerangka kerja birokrasi. Standard Operational Procedure (SOP) yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan KMB di SKB tersedia dalam bentuk buku pedoman dan pedoman dari Direktorat Jenderal Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kebijakan KMB ini akan lebih mudah dilaksanakan jika tugas dan bagian tugasnya diterapkan sesuai dengan kebijakan.

b. Kurikulum Merdeka Belajar

Merdeka belajar merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim, bahwa ada dua poin terpenting dalam pendidikan, yaitu merdeka belajar dan Tutor penggerak. Merdeka belajar artinya Tutor dan muridnya memiliki kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar mandiri dan kreatif.<sup>37</sup> Dalam proses kebijakan dilembaga pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan jembatan yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil (outcome) kebijakan yang diharapkan.

---

<sup>37</sup> Fahrian Firdaus Syafi'i, "Merdeka Belajar: Sekolah Penggerak," *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN DASAR "Merdeka Belajar Dalam Menyambut Era Masyarakat 5.0,"* no. November (2021): 46–47.hlm.18.

Menurut Van Meter dan Van Horn kebijakan adalah kegiatan yang memerlukan upaya untuk menerjemahkan keputusan menjadi tindakan nyata dalam kerangka waktu tertentu.<sup>38</sup> Sebagai upaya untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditentukan oleh keputusan kebijakan yang dibuat oleh organisasi publik yang berpusat pada tujuan yang telah ditetapkan.

c. Pengertian Kurikulum Merdeka Belajar

Kurikulum atau program merdeka belajar diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim sebagai bentuk evaluasi penyempurnaan kurikulum 2013.<sup>39</sup> Sebelumnya, kurikulum ini juga disebut sebagai Kurikulum Prototipe yang merupakan salah satu bagian dari upaya pemerintah untuk menghasilkan generasi penerus yang lebih kompeten di berbagai bidang.

Menurut Mendikbud, kebebasan belajar bergantung pada keinginan agar hasil pendidikan memberikan kualitas yang lebih baik dan tidak lagi menghasilkan Warga belajar yang tidak hanya pandai menghafal, tetapi juga memiliki kemampuan analisis yang tajam, berpikir dan pemahaman yang komprehensif tentang belajar untuk memperbaiki diri.<sup>40</sup> Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di

---

<sup>38</sup> Barrett, *Leadership Communication*.

<sup>39</sup> Amari, "Manajemen Kurikulum Merdeka Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Nganjuk."

<sup>40</sup> Syafi'i, "Merdeka Belajar: Sekolah Penggerak."

mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Tutor memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Projek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kurikulum merdeka belajar awalnya disebut kurikulum penggerak, kemudian berganti nama menjadi kurikulum prototipe, hingga saat ini menjadi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka diluncurkan sebagai kurikulum pilihan tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 hingga 2024 dan akan dikaji ulang setelah tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Esensi Kurikulum Merdeka adalah pendidikan berpatokan pada esensi belajar, di mana setiap Warga belajar memiliki bakat dan minatnya masing-masing.

d. Tujuan Kurikulum Merdeka Belajar

Tujuan merdeka belajar adalah untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 secara efektif. Untuk saat ini Kurikulum 2013 tetap dapat digunakan sembari sekolah bersiap-siap untuk menerapkan kurikulum baru ini. Setiap satuan pendidikan dapat menerapkan Kurikulum merdeka secara bertahap berdasarkan kesiapan masing-masing. Merdeka belajar merupakan proses pendidikan untuk menciptakan suasana-

suasana pembelajaran yang membahagiakan dan menggembirakan.<sup>41</sup>

Kurikulum Merdeka diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran.<sup>42</sup> Merdeka belajar bermakna memberikan kesdempatan belajar secara bebas dan nyaman kepada Warga belajar untuk belajar dengan tenang, santai dan gembira tanpa adanya stress dan tekanan dengan memperhatikan bakat alami yang mereka punya tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar keahlian mereka.

## 2. Implementasi Manajemen kurikulum

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberi dampak, baik berupa perubahan, pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Implementasi kurikulum juga dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis (*written curriculum*) dalam bentuk pembelajaran.<sup>43</sup> Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Yogyakarta merupakan Satuan Pendidikan Non-

---

<sup>41</sup> Rosmiaty Azis, Pengantar Administrasi Pendidikan, (2016).hlm.42.

<sup>42</sup> Rahayu et al., "Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di Sekolah Penggerak."(2022). Hlm18.

<sup>43</sup> Laili, Hariyati, and Roesminingsih, "Implementasi Manajemen Kurikulum Pada Program Unggulan Non Akademik Di Sdit Firdaus Mojokerto."(2021).hlm.23.



Formal yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Pada tahun ajaran 2023/2024, Kurikulum Merdeka diterapkan pada Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan Program Paket A di Kelas IV, Paket B di Kelas VII dan Paket C di Kelas X. Sementara pada Pendidikan Kesetaraan Program Paket A di kelas V dan VI, Paket B di kelas VIII dan IX serta Paket C di kelas XI dan XII masih menerapkan Kurikulum 2013. Selain memberikan bekal pengetahuan kepada peserta didik, SKB Kota Yogyakarta juga menyediakan program pemberdayaan dan keterampilan penunjang seperti Teknologi Informasi dan Komunikasi, Tata Boga, Tata Busana, dan Membatik sehingga mendorong berbagai kegiatan ekonomi peserta didik. Kegiatan ekonomi ini berjalan baik secara konvensional (jual beli langsung) maupun secara modern, melalui *e-commerce*.

Menurut Barret manajemen merupakan sebagai seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.<sup>44</sup> Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>45</sup> Kehadiran manajemen dalam suatu organisasi adalah untuk melaksanakan kegiatan agar tujuan dapat tercapai secara

---

<sup>44</sup> Barrett, *LeadershipCommunication*.

<sup>45</sup> Susatyo Herlambang, *Pengantar Manajemen: Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen* (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013).hlm,17.



efektif dan efisien. Manajemen pendidikan dalam perspektif persekolahan, dengan merujuk kepada pemikiran George R. Terry meliputi: (1) perencanaan (planning); (2) pengorganisasian (organizing); (3) pelaksanaan (actuating) dan (4) pengawasan (controlling).<sup>46</sup> Facrudin dan Ali Idrus berpendapat bahwa ruang lingkup manajemen kurikulum yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum.<sup>47</sup>

#### **a. *Planning* (Perencanaan) Manajemen Kurikulum**

Manurut Oemar Hamalik, perencanaan merupakan rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>48</sup> Dimana lembaga pendidikan harus mempunyai rencana jangka panjang yang ingin di capai, agar mampu menerapkan program kerja dengan baik. Dalam menerapkan kurikulum tentunya lembaga pendidikan harus melalui proses perencanaan dan pembentukan serta langkah-langkah dalam merencanakan, pada dasarnya meliputi membuat keputusan mengenai arah yang akan dituju, tindakan yang akan diambil, sumber daya yang akan diolah dan teknik/metode yang dipilih untuk digunakan.<sup>49</sup> Kurikulum adalah bagian dari

---

<sup>46</sup> Leslie W. Rue George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, penerjemah (Jakarta : Bumi Aksara, 2005).hlm.42.

<sup>47</sup> Dinn Wahyudin, "Manajemen Pendidikan Tinggi, Pengembangan Kurikulum, Pembinaan Profesional," 2014, hlm.65.

<sup>48</sup> Mohamad Ahyar Ma'arif, "Manajemen Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam," *Manajemen Pendidikan Silam* 1, no. 1 (2012): hlm.10.

<sup>49</sup> Aan Komariah Engkoswara, *Administrasi Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2015).hlm.12.

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.<sup>50</sup>

Menurut Peter F. Oliva, perencanaan kurikulum adalah fase permulaan dalam kurikulum, ketika membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menyusun perencanaan, dimana Tutor dan Warga belajar akan dibawa. Perencanaan adalah fase berfikir atau merancang tindakan yang akan diambil untuk diimplementasikan.<sup>51</sup>

Jadi, perencanaan dalam manajemen kurikulum adalah membuat keputusan secara matang dalam rangka mencapai tujuan, tindakan yang akan diambil, sumber daya yang akan diolah dan teknik/metode yang dipilih untuk dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan kurikulum demi mencapai tujuan organisasi atau lembaga pendidikan.

#### ***b. Organizing (Pengorganisasian) Manajemen Kurikulum***

Mengorganisasikan merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan kerja antara orang lain sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah

---

<sup>50</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 Ayat 19,” n.d.

<sup>51</sup> “Peter F. Oliva, *Developing the Curriculum*, (Boston: Little, Brown and Company, 1982), Hlm. 25.

ditetapkan.<sup>52</sup> Pengorganisasian di lembaga pendidikan terdapat kumpulan atau sejumlah orang dalam proses pembagian tugas pekerjaan, koordinasi dimana kerja sama berlangsung dan usaha mencapai tujuan sekaligus menampung tujuan individu. Proses pembagian pekerjaan ini dapat menciptakan pemimpin dan anggota dengan otoritas keteladanannya akan mempengaruhi para anggotanya untuk bekerja secara suka rela dan bersama-sama mencapai tujuan secara efektif dan efisien.<sup>53</sup>

Menurut George R. Terry Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan guna untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu.<sup>54</sup>

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa pengorganisasian pada dasarnya merupakan upaya untuk melengkapi rencana-rencana yang telah dibuat dengan susunan organisasi pelaksanaannya. Pengorganisasian dalam manajemen kurikulum adalah upaya untuk melengkapi perencanaan yang telah dibuat dengan susunan organisasi pelaksanaannya.

---

<sup>52</sup> Engkoswara, *Administrasi Pendidikan*.

<sup>53</sup> Engkoswara.

<sup>54</sup> Terry, *Asas-Asas Manajemen*.

### c. *Actuating (Pelaksanaan) Manajemen Kurikulum*

Pelaksanaan (*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang paling utama yang berhubungan dengan usaha memberikan bimbingan, saran, perintah atau intruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

George R. Terry mengemukakan bahwa pelaksanaan (*actuating*) merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran lembaga pendidikan.<sup>55</sup> Pelaksanaan (*actuating*) tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya.<sup>56</sup> Pada tahap ini, tugas utama kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah melakukan supervisi dengan tujuan untuk membantu Tutor menemukan dan mengatasi kesulitan yang dihadapi.

---

<sup>55</sup> Terry.

<sup>56</sup> H Usman, "Manajemen: Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan.," (2013).hlm.17.

#### **d. *Controlling (Pengawasan) Manajemen Kurikulum***

Pengawasan (*controlling*) merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Dimana pengawasan merupakan sebuah proses untuk meneliti dan mengetahui sampai dimana proses pelaksanaan yang dilakukan dilembaga pendidikan dalam mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan.<sup>57</sup>

Proses pengawasan dapat melibatkan beberapa elemen yaitu; menetapkan standar kinerja, mengukur kinerja, membandingkan unjuk kerja dengan standar yang telah ditetapkan, mengambil tindakan korektif saat terdeteksi penyimpangan.<sup>58</sup> Dalam pengertian terbatas, pengawasan kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Jadi, pengawasan dalam manajemen kurikulum adalah kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan dan memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini mengkaji permasalahan penelitian dengan sistematika yang tersusun berdasarkan urutan per bab. Setiap bab mengandung beberapa

---

<sup>57</sup> Usman.

<sup>58</sup> Engkoswara, *Administrasi Pendidikan*.

sub-sub pembahasan yang disebut dengan bagian isi. Berikut ini adalah penjelasannya:

BAB I yakni pendahuluan yang merupakan pengantar dalam penelitian. Bab ini berisi beberapa sub pembahasan seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

BAB II yakni bagian yang membahas terkait metode penelitian yang digunakan untuk membahas masalah penelitian.

BAB III memuat hasil penelitian dan pembahasan terkait dasar kebijakan penerapan kurikulum merdeka belajar, Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar di Sanggar Kegiatan Belajar Kota Yogyakarta dan keberhasilan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Yogyakarta dalam menerapkan kurikulum merdeka.

BAB IV merupakan bagian penutup yang berisi simpulan, saran, dan kata penutup.



## BAB IV

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Kebijakan SKB Kota Yogyakarta dalam penerapan kurikulum merdeka belajar dengan kebijakan kurikulum yang secara umum dengan faktor sebagai berikut: adanya *Komunikasi* SKB Kota Yogyakarta menidak lanjuti Surat Keputusan SK yang di keluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah, terkait dasar kebijakan dalam menerapkan kurikulum merdeka belajar. Ketersedian Sarana dan prasarana dan pembiayaan di SKB Kota Yogyakarta cukup memadai dan terpenuhi. Disposisi, Dalam pengembangan model pengelolaan program pemberdayaan dan keterampilan. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) memberikan masukan dalam merumuskan dan menetapkan pedoman struktur organisasi dalam penerapan kurikulum merdeka belajar dan melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap kebijakan program kurikulum merdeka.
2. Implementasi Manajemen Kuriulum Merdeka Belajar di SKB Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan mengaplikasikan fungsi-fungsi manajemen yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: *Pertama*, pada aspek Perencanaan kurikulum merdeka SKB Kota Yogyakarta, sudah dilakukan dengan baik, salah satunya menyusun sendiri



Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan dengan pemberdayaan, yang mengacu pada prinsip-prinsip merdeka belajar, secara sistematis, perencanaan kurikulum di SKB Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan pedoman kurikulum merdeka belajar. *Kedua* aspek Pengorganisasian kurikulum merdeka belajar di SKB Kota Yogyakarta yakni kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai penanggung jawab dan pembuat keputusan, membentuk koordinator program kurikulum merdeka. *Ketiga* aspek Pelaksanaan kurikulum merdeka belajar di SKB Kota Yogyakarta sudah berjalan secara maksimal dalam pelaksanaannya belum semua kelas dilaksanakan, dimana di SKB sendiri dalam penerapan kurikulum merdeka mandiri berubah. *Keempat* Proses pengawasan kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) melakukan kegiatan supervisi, mengarahkan, membimbing, mengawasi secara berkala kegiatan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler, mendiskusikan temuan ataupun permasalahan, memberikan semangat, dukungan dan motivasi. Penerapan kurikulum merdeka belajar baru dilaksanakan selama dua tahun dan belum diterapkan di semua jenjang kelas, sehingga belum maksimal dalam proses pencapaian evaluasi kurikulum di SKB Kota Yogyakarta.

3. Sanggar kegiatan belajar (SKB) Kota Yogyakarta telah menunjukkan keberhasilan dalam penerapan kurikulum merdeka belajar melalui berbagai inovasi dan kegiatan yang mendukung pembelajaran

mandiri dan kreatif. Implementasi manajemen kurikulum merdeka belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Yogyakarta telah mencakup sejumlah kegiatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi dan karakter Warga belajar sesuai dengan profil peajar pancasila.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka saran dalam penelitian ini adalah:

1. Secara garis besar, kebijakan dalam penerapan program kurikulum merdeka belajar di SKB Kota Yogyakarta dapat dikatakan terukur secara sistematis. Sehingga yang perlu untuk dilakukan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah selalu memberikan dukungan penuh serta mengupayakan peningkatan terhadap pemahaman pendidik orang tua, dan masyarakat terhadap penerapan kebijakan kurikulum merdeka belajar.
2. Secara garis besar, manajemen pada program pemberdayaan dan keterampilan dalam penerapan kurikulum merdeka belajar di SKB Kota Yogyakarta, diharapkan para pendidik mampu melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan, untuk meningkatkan kompetensi Tutor, diharapkan mengikuti kegiatan seminar, workshop, dan berbagi praktik baik dengan teman sejawat serta memanfaatkan sumber yang telah disediakan oleh pemerintah.

Semoga saran penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana kebijakan dalam penerapan fungsi-fungsi manajemen yang dijalankan dalam penerapan kurikulum merdeka belajar di sanggar kegiatan Belajar Kota Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aguayo Torrez, Madahi Veronica. "Konsep Dan Fungsi Manajemen Pendidikan Yasya" 3, No. 1 (2021): 49–62.
- Ahmad, Ahmad, Faisal Madani, M. Ishaq, Lasi Purwito, And Ratih Permata Sari. "Evaluasi Kebijakan Merdeka Belajar Pada Satuan Pendidikan Nonformal." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, No. 2 (2022): 1143. <https://doi.org/10.37905/Aksara.8.2.1143-1154.2022>.
- "Ahmad Sahnun, Dan Tri Wibowo, Arah Baru Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Di Sekolah Dasar, Sittah: Journal Of Primary Education, Vol. 4 (1), April, 2023, Hlm. 29-39," N.D.
- Alhamuddin. "Sejarah Kurikulum Di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pengembangan Kurikulum) Alhamuddin1." *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini* 1 (2016): 43. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1014804&val=15400&title=Dinamika Perubahan Kurikulum Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 Paud](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1014804&val=15400&title=Dinamika%20Perubahan%20Kurikulum%20Kebijakan%20Perubahan%20Kurikulum%202013%20Paud).
- Alkatiri, Rahmawaty, Intan Safitri Mokodompit, And Rahmathias Jusuf. "Manajemen Kurikulum Madrasah Aliyah Berorientasi Merdeka Belajar Di Sulawesi Utara." *Journal Of Islamic Education Leadership* 2, No. 1 (2022): 73–86. <https://doi.org/10.30984/jmpi.v2i1.444>.
- Amari, Rizqa Oktavia. "Manajemen Kurikulum Merdeka Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Nganjuk," 2023, 31–41.
- Ammas, Sitti. "Pembelajaran Daring Dalam Perspektif Merdeka Belajar." *Jurnal Sipatokkong Bpsdm Sulawesi Selatan* 2, No. 1 (2021): 35–46. <http://ojs.bpsdmsulsel.id/index.php/sipatokkong/article/view/103/66>.
- Ari Putra Sofino. "Alur Merrdeka Pada Workshop Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila ( P5 ) Untuk Program Pendidikan Kesetaraan Di Spnf- Skb" 1, No. 2 (2023): 46–54. <https://doi.org/10.33369/abdimas.v1i2.31441>.
- Azis, Rosmiaty. *Pengantar Administrasi Pendidikan*, 2016.

- Barrett, Deborah J. *Leadershipcommunication*. Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Mcgraw, 2013.
- Danuri S.B. Waluyo Sugiman Y.L. Sukestiyarn. *Model Pembelajaran Berdiferensiasi Untuk Sekolah Dasar Inklusif*, 2023.
- Desrianti, And Yuliana Nelisma. “Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Perpektif Manajemen Pendidikan Islam.” *Al-Fahim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, No. 2 (2022): 158–72.  
<https://doi.org/10.54396/Alfahim.V4i2.309>.
- Djuwarijah, Djuwarijah. “Strategi Peningkatan Manajemen Kurikulum Dalam Pengembangan Mutu Sdm Menuju Terwujudnya Lulusan Madrasah Aliyah Berwawasan Internasional.” *El-Tarbawi* 1, No. 2 (2008): 201–14.  
<https://doi.org/10.20885/Tarbawi.Vol1.Iss2.Art4>.
- Edy Sutrisno. “Manajemen Sumber Daya Manusia,” 2019.
- Engkoswara, Aan Komariah. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- “Eny Prawasti, Selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum Skb Kota Yogyakarta, Wawancara Pada Hari Rabu 6 Maret 2024.,” N.D.
- George R. Terry, Leslie W. Rue. *Dasar-Dasar Manajemen*. Penerjemah. Jakarta : Bumi Aksara, 2005.
- Herlambang, Susatyo. *Pengantar Manajemen : Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen*. Yogyakarta: Gosyen Publishing , 2013.
- Hilmin, Hilmin, Dwi Noviani, And Ani Nafisah. “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Kurikulum Merdeka.” *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, No. 2 (2022): 148–62.  
<https://doi.org/10.55606/Khatulistiwa.V2i2.565>.
- “<https://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/profil-pelajar-pancasila>,” N.D.
- “<https://ditsmp.kemdikbud.go.id/kurikulum-merdeka-sebagai-upaya-pemulihan-pembelajaran/>,” N.D.
- “<https://dpmptsp.bireuenkab.go.id/izin-penyelenggaraan-satuan-pendidikan-non-formal-kabupaten-bireuen/>,” N.D.
- “[https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/Mod\\_Resource/Content/1/index.html](https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/Mod_Resource/Content/1/index.html),” N.D.

- “<https://Kominfo.Jatimprov.Go.Id/Berita/Kadis-Kominfo-Jatim-Strategi-Komunikasi-Mendukung-Implementasi-Kebijakan-Yang-Efektif>,” N.D.
- “<https://Serpong.Khoiruummah.Id/Ilmu-Khoiru-Ummah-Serpong/>,” N.D.
- “<https://Skb.Jogjakota.Go.Id/Page/Index/Sejarah>,” N.D.
- “<https://Www.Ksi-Indonesia.Org/Id/Wawasan/Detail/2519-Komunikasi-Kebijakan-Lebih-Penting-Ketimbang-Sosialisasi-Kebijakan>,” N.D.
- Iswanto, Fachruddin Azmi Dan Juli. “Fachruddin Azmi Dan Juli Iswanto, Merdeka Belajar, International Journal Of Islamic Education, Research And Multiculturalism Ijierm: Vol. 3 No. 3 September – December 2021, Hlm” 3, No. 3 (2021): 157–72.
- Iverson, Brent L, And Peter B Dervan. “Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan- Membangun Prasarana Fisik, Sosial Dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado.” *Ilmusosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan* 3 (2016): 7823–30.
- “Jarot, S.Pd. Guru Skb Kota Yogyakarta, Wawancara Pada Hari Selasa 5 Maret 2024, Pukul 09.00 Wib,” N.D.
- Jayanti, Margi. “Implementasi Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar (Studi Kasus Di Smpn 1 Trimurjo),” 2023, 1–66.
- Junaidi. “Anotasi Penelitian Kualitatif John W. Creswell,” No. 1810128110004 (2014): 1–23.
- Kemendikbudristek. “Buku Saku: Tanya Jawab Kurikulum Merdeka.” *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi*, 2022, 9–46. [Http://Repositori.Kemdikbud.Go.Id/Id/Eprint/25344](http://Repositori.Kemdikbud.Go.Id/Id/Eprint/25344).
- “Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. *Desan Induk Kurikulum* 2013. (Jakarta: Kemendikbud, 2013).,” N.D.
- Kresna. “Indikator Implementasi Kebijakan Publik.” *Namaha*, No. September (2019). <https://Konsultasiskripsi.Com/2019/09/15/Indikator-Implementasi-Kebijakan-Publik-Skripsi-Dan-Tesis/>.
- Kusnia, Nurin. “Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi



- Di Sdn Betet 1 Kediri.” *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan* 3, No. 1 (2019): 25. <https://doi.org/10.26740/Jdmp.V3n1.P25-30>.
- Laili, Irfana Nurul, Nunuk Hariyati, And Erny Roesminingsih. “Implementasi Manajemen Kurikulum Pada Program Unggulan Non Akademik Di Sdit Firdaus Mojosari Mojokerto.” *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 8, No. 2 (2022): 1452–63. <https://doi.org/10.58258/Jime.V8i2.3223>.
- Ley 25.632. “Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Sekretariat Daerah Kota Samarinda” 3, No. 53 (2002): 381–93.
- Machali Dan Ara. “The Handbook Of Education Management: Teori Dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah Di Indonesia.Hlm 23.” *Narratives Of Therapists’ Lives*, 1997, 138–39.
- Maiti, And Bidinger. “Telaah Pustaka Implementasi Kebijakan.” *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53, No. 9 (1981): 1689–99.
- Markhamah, Lilik Alim. “Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Angkatan Muda Masjid Dan Musholla (Amm) Kotagede Yogyakarta,” 2011, 1–53.
- Mohamad Ahyar Ma’arif. “Manajemen Pengembangankurikulum Pendidikan Islam.” *Manajemen Pendidikan Silam* 1, No. 1 (2012): 1–15.
- Moleong, L, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin, 2010. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3ejyaaaaj&hl=en>.
- Murjani, Huges. “Strategi Reformasi Birokrasi Pendidikan Dan Kebijakan Kemendikbud.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6 (2022): 11954–62.
- “Nailul Muna, S.Pd. Komite Skb Kota Yogyakarta, Wawancara Pada Hari Kamis 14 Maret 2024, Pukul 09.00 Wib,” N.D.
- Nasbi, Ibrahim. “Manajemen Kurikulum: Sebuah Kajian Teoritis.” *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 1, No. 2 (2017): 318–30. <https://doi.org/10.24252/Idaarah.V1i2.4274>.
- Nasution, Abdul Fattah, And Meyniar Albina. “Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Aliyah Negeri Labuhanbatu.” *Edukasi Islami:*

- Jurnal Pendidikan Islam* 11, No. 03 (2022): 957.  
<https://doi.org/10.30868/Ei.V11i03.3063>.
- “Peter F. Oliva, Developing The Curriculum, (Boston: Little, Brown And Company, 1982), Hlm. 25,” N.D.
- “Primandari Wijayanti, Pj Kurikulum Skb Kota Yogyakarta, Wawancara Pada Hari Kamis 7 Maret 2024, Pukul 09.00 Wib,” N.D.
- Rahayu, Restu, Rita Rosita, Yuyu Sri Rahayuningsih, Asep Herry Hernawan, And Prihantini Prihantini. “Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di Sekolah Penggerak.” *Jurnal Basicedu* 6, No. 4 (2022): 6313–19.  
<https://doi.org/10.31004/basicedu.V6i4.3237>.
- Ramadhan, M. *Metode Penelitian*. Ipta Media Nusantara., 2021.
- Rosnita, Hera Yanti, And Najmuddin. “Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar Pada Sekolah Penggerak Untuk Meningkatkan Profil Pelajar Pancasila Pada Sd Negeri 3 Ulim Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh.” *Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 14, No. 3 (2023): 359–67.
- Sahnan, Ahmad, And Tri Wibowo. “Arah Baru Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Di Sekolah Dasar.” *Sittah: Journal Of Primary Education* 4, No. 1 (2023): 29–43. <https://doi.org/10.30762/Sittah.V4i1.783>.
- “Saila Makwatul Amrina, S.Pd. Staff Skb Kota Yogyakarta, Observasi, Pada Hari Rabu 14 Februari 2024, Pukul 09.00 Wib,” N.D.
- “Salwa Selaku Siswa Paket B Skb Kota Yogyakarta.,” N.D.
- Sarmila, Andi Tenri Sanna, Sulham B. “Peran Birokrasi Dalam Kebijakan Peningkatan Mutu.” *Mappesona Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam, YOGYAKARTA* No. 1 (2021): 12–21.  
<https://www.google.com/url?sa=T&rct=J&q=&esrc=S&source=Web&cd=&cad=Rja&uact=8&ved=2ahukewj7mkvqr6f4ahuxrmwghfvva9cqfnoecc8qaq&url=https%3a%2f%2fjurnal.iain-bone.ac.id%2findex.php%2fmappesona%2farticle%2fdownload%2f1769%2f942&usg=Aovvaw3crvgebfqywuyhxp78yp>.
- Satyaninrum, I. R., Tahirs, J. P., Se, M., Bhaga, B. J., Kpalet, P., Agustikawati, N., ... & Sh I, M. H. *Metodologi Penelitian*. Cendekia Publisher., 2022.



- Sentot Harman Glendoh. "Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi." *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 2, No. 1 (2000): Pp.43-56.  
[Http://Puslit2.Petra.Ac.Id/Ejournal/Index.Php/Man/Article/View/15598](http://Puslit2.Petra.Ac.Id/Ejournal/Index.Php/Man/Article/View/15598).
- "Sudijarto, Kepala Sekolah Skb Kota Yogyakarta, Wawancara Pada Hari Selasa 5 Maret 2024, Pukul 09.00 Wib," N.D.
- Syafaruddin, Amiruddin Ms. "Manajemen Kurikulum." *Perdana Publishing*, 2017, 1–208.
- Syafi'i, Fahrian Firdaus. "Merdeka Belajar: Sekolah Penggerak." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar "Merdeka Belajar Dalam Menyambut Era Masyarakat 5.0,"* No. November (2021): 46–47.
- Terry, George R ; *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Alumni, 2012.
- Triwiyanto, Teguh. "Buku-Manajemen-Kurikulum.Pdf," 2015.
- "Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 Ayat 19," N.D.
- Usman, H. "Manajemen: Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan." 2013.
- Wahyudin, Dinn. "Manajemen Pendidikan Tinggi, Pengembangan Kurikulum, Pembinaan Profesional," 2014, 259–70.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA